

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengangguran didefinisikan sebagai suatu permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah pengangguran menjadi salah satu masalah makro ekonomi yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluarannya. Pengangguran dalam jangka panjang berdampak pada efek psikologis yang buruk bagi diri penganggur maupun keluarganya (Sukirno, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran merupakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Definisi tersebut, adalah mereka yang tergolong kedalam kelompok penduduk usia kerja. Usia kerja biasanya adalah warga negara dengan umur 15 tahun dan lebih yang tidak dalam masa sekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lain diluar kegiatan pribadi. Konsep tersebut umumnya disebut pengangguran terbuka.

Pengangguran menjadi masalah yang begitu kompleks sebagaimana terdapat berbagai jenis faktor yang saling mempengaruhi terkait penyebabnya (Muslim,

2014). Salah satu faktornya ialah populasi penduduk Indonesia yang meningkat sebagaimana Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia yang mencapai 273,523,615 jiwa (*Population by Country (2021) - Worldometer, 2021*). Selain itu, populasi penduduk Indonesia juga meningkat sebagaimana hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 270,20 juta jiwa. Hasil SP2020 tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan hasil SP2010, yang artinya meningkatnya jumlah warga negara sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun, sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.1  
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1961–2020



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021

Selain itu, hasil proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS, pada 2035 diperkirakan akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa dengan populasi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yakni antara 15-64 tahun. Hal tersebut mengakibatkan bonus demografi di Indonesia, artinya usia produktif dapat

dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan atau menjadi beban bagi perekonomian seperti meningkatnya pengangguran.

Melihat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada 2020 menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendokumentasikan total pengangguran terbuka tingkat nasional pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang atau 7,07% dari total angkatan kerja, jumlah ini melonjak 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019, sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 1.2  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Indonesia Periode  
Agustus 2018–2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags 2018–Ags 2019		Perubahan Ags 2019–Ags 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	198,13	201,19	203,97	3,06	1,54	2,78	1,38
Angkatan Kerja	133,36	135,86	138,22	2,50	1,87	2,36	1,74
Bekerja	126,29	128,76	128,45	2,47	1,96	-0,31	-0,24
Pengangguran	7,07	7,10	9,77	0,03	0,42	2,67	37,61
Bukan Angkatan Kerja	64,77	65,33	65,75	0,56	0,86	0,42	0,64
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,30	5,23	7,07	-0,07		1,84	
Perkotaan	6,44	6,29	8,98	-0,15		2,69	
Perdesaan	3,97	3,92	4,71	-0,05		0,79	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,31	67,53	67,77	0,22		0,24	
Laki-Laki	82,80	83,25	82,41	0,45		-0,84	
Perempuan	51,80	51,81	53,13	0,01		1,32	

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber : Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII, 05 November 2020

Jumlah pengangguran yang tinggi sebagaimana dinyatakan (Siagian, 2020) bahwa beberapa aspek penyebab pengangguran terbuka yakni para pencari lapangan pekerjaan kurang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang diperlukan pengguna tenaga kerja sehingga tidak diterimanya para pencari kerja karena tidak memenuhi berbagai kualifikasi oleh organisasi atau perusahaan. Serta

berbagai organisasi dan perusahaan terpaksa mengambil keputusan untuk tidak merekrut tenaga kerja baru akibat kelesuhan bidang ekonomi, seperti kelesuhan ekonomi (resesi) yang dialami Indonesia akibat Pandemi Covid-19 sejak akhir Desember 2019 menyebabkan peningkatan pengangguran terjadi di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur pada 2020, pengangguran meningkat 466,02 ribu orang dengan peningkatan 2,02 persen poin sehingga menjadi 5,84 persen pada Agustus 2020, sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.3  
Penduduk Usia Kerja Provinsi Jawa Timur Menurut Jenis Kegiatan Utama,  
Agustus 2018 - Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2019-Agustus 2020)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen
Penduduk Usia Kerja	31,16	31,42	31,66	241,32	0,77
Angkatan Kerja	21,68	21,87	22,26	396,37	1,81
Bekerja	20,83	21,03	20,96	-69,65	-0,33
Penganggur	0,85	0,84	1,30	466,02	55,80
Bukan Angkatan Kerja	9,49	9,55	9,39	-155,05	-1,62
	persen	persen	persen		persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,91	3,82	5,84		2,02
Perkotaan	4,55	4,49	7,37		2,88
Perdesaan	3,23	3,08	4,13		1,05
Laki-laki	4,05	3,97	6,48		2,51
Perempuan	3,70	3,60	4,92		1,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,56	69,61	70,33		0,72
Laki-laki	84,41	84,74	84,67		-0,07
Perempuan	55,31	55,07	56,56		1,49

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil Proyeksi Supas 2015

Sumber : Berita Resmi Statistik No.70/11/35/Thn.XVIII, 5 November 2020

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam peningkatan pengangguran tertinggi pada 2020 di Provinsi Jawa Timur. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT naik 6,35 persen poin menjadi 10,97 persen atau 131,44 ribu orang menganggur pada Agustus 2020, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.4  
Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kegiatan Utama,  
Agustus 2018 - Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 tahun (Agustus 2019-Agustus 2020)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ribu orang	Ribu orang	Ribu orang	Ribu orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	1 723,81	1 753,75	1 783,77	30,02	1,71
Angkatan Kerja	1 118,55	1 174,73	1 198,23	23,50	2,00
Bekerja	1 066,83	1 120,48	1 066,79	-53,69	-4,79
Pengangguran	51,72	54,25	131,44	77,19	142,29
Bukan Angkatan Kerja	605,26	579,02	585,53	6,51	1,12
	Persen	Persen	Persen		Persen Poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,62	4,62	10,97		6,35
Laki-laki			11,65		
Perempuan			9,91		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,89	66,98	67,17		0,19
Laki-laki			81,55		
Perempuan			52,78		

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil Proyeksi Supas 2015

Sumber : Berita Resmi Statistik No.1/11/Thn.2020, 16 November 2020

Hal tersebut juga dinyatakan oleh H. Subandi selaku Wakil Bupati Sidoarjo dalam kutipan berita yang dimuat [suarajatimpost.com](http://suarajatimpost.com) (Krisna, 2021) :

SIDOARJO - Angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mencapai yang tertinggi di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan pindah tempat produksi.

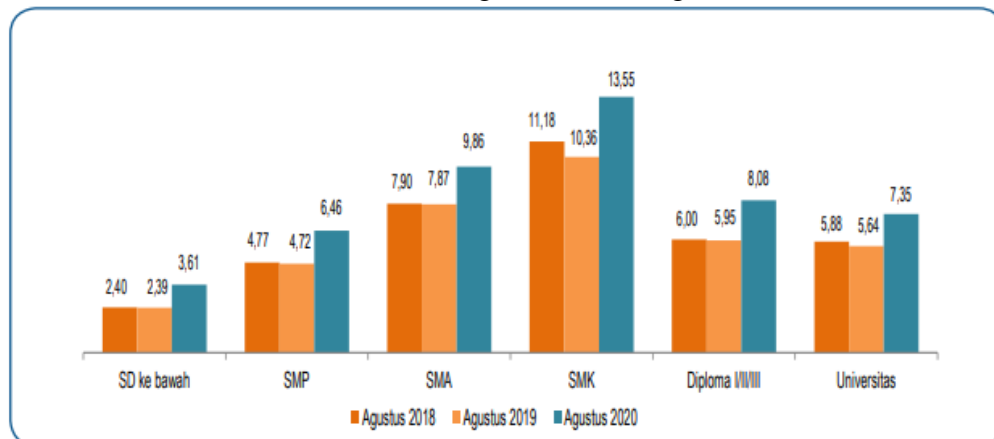
Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Ia mengungkapkan bahwa angka pengangguran mencapai 10,97 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Kondisi perusahaan juga ada yang henggang, dan pengembangan ke daerah.

Sumber : (<https://suarajatimpost.com/news/angka-pengangguran-di-sidoarjo-tertinggi-di-jawa-timur/> diakses pada 7 Oktober 2021)

Fenomena pengangguran terbuka secara nasional, provinsi salah satunya Provinsi Jawa Timur, hingga di Kabupaten Sidoarjo faktanya berdasarkan status pendidikan diduduki oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai posisi penyumbang pengangguran tertinggi. Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Angka pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2018

sampai dengan Agustus 2020 didominasi lulusan SMK sebesar 11,18% pada 2018, 10,36% pada 2019, dan 13,55% pada 2020. Sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.5  
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode Agustus 2018–Agustus 2020

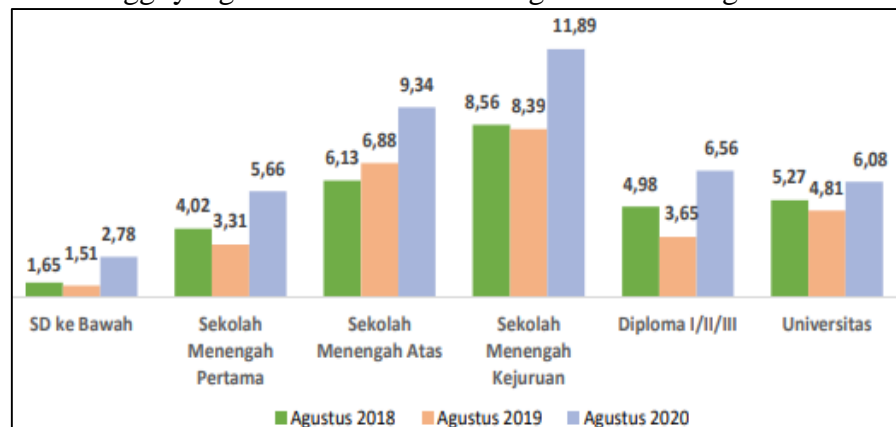


Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber : Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII, 05 November 2020

Kemudian, angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020 lulusan SMK mendominasi sebesar 8,56% pada 2018, 8,39% pada 2019, dan 11,89% pada 2020, seperti gambar berikut.

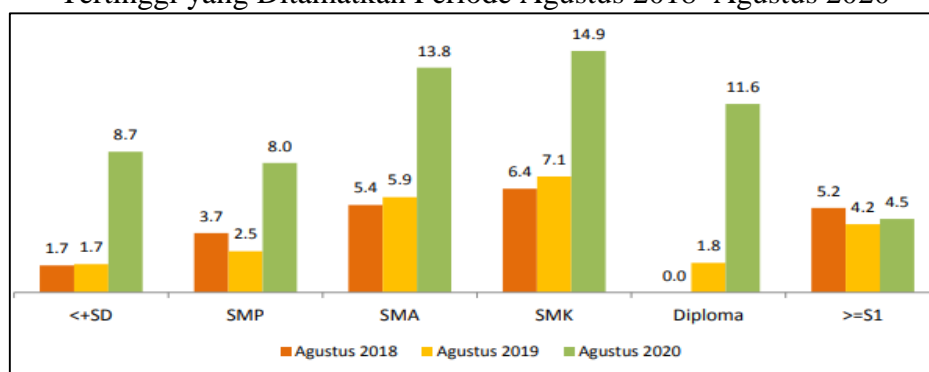
Gambar 1.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode Agustus 2018–Agustus 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik No.70/11/35/Thn.XVIII, 5 November 2020

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo juga demikian, diduduki oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu sebanyak 14,9 persen. Dengan spesifikasi persentase sebesar 6,4% pada 2018, 7,1% pada 2019, dan 14,9% pada 2020, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode Agustus 2018–Agustus 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik No.1/11/Thn.2020, 16 November 2021

Adapun jumlah absolut pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo menurut tingkat pendidikan sebagai berikut.

Gambar 1.8  
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020 Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
≤SD	2.358	2.470	2.988	12.313
SMTP	3.845	6.877	4.928	16.124
SMTA Umum	17.483	16.489	16.244	45.951
SMTA Kejuruan	22.868	15.951	21.247	43.041
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	797	0	772	7.458
UNIVERSITAS	6.124	9.935	8.068	6.557
<b>JUMLAH</b>	<b>53.475</b>	<b>51.722</b>	<b>54.247</b>	<b>131.444</b>

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2020.

Sumber : Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengangguran lulusan SMK pada 2017 hingga 2018 mengalami penurunan sebagaimana semula sebesar 22.868 ribu orang menjadi 15.951 ribu orang. Kemudian pada 2019 mengalami

peningkatan menjadi 21.247 ribu orang dan pada 2020 meningkat tinggi sebesar 43.041 ribu orang.

Tingkat pengangguran terbuka yang didominasi lulusan SMK diatas mengartikan bahwa tidak adanya *link and match* antara pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja. Data-data statistik tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan SMK belum sepenuhnya dengan yang diharapkan menjadi penggerak dalam perbaikan ekonomi negara (Mulyatiningsih et al., 2014). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kejuruan ialah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Clarke & Winch (2007) dalam (Prianto et al., 2021) bahwa untuk meningkatkan ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan, dan peningkatan kualitas kerja dalam rangka mengembangkan produktivitas masyarakat dibentuknya pendidikan vokasional.

Kesuksesan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari siswanya yang telah menyelesaikan program studi dan bekal yang dimiliki guna menempuh di dunia kerja, melainkan besarnya jumlah alumni yang memasuki dunia kerja atau berwirausaha. *European Centre for the Development of Vocational Training* dalam Cedefop (2011) dikutip oleh (Prianto et al., 2021) menyatakan tenaga kerja dengan kualifikasi menengah yakni pendidikan kejuruan dan pelatihan berkontribusi besar di negara maju, seperti Uni Eropa. Dengan demikian, persiapan siswa SMK yang siap bekerja, berjiwa wirausaha, cerdas, memiliki daya saing agar dapat berkompetisi dalam pasar global adalah hal yang esensial untuk dilakukan.



Pemerintah menaruh harapan besar bagi SMK untuk dapat menjadi institusi pendidikan yang unggul dan mampu menjawab tuntutan dunia kerja. Untuk itu, pemerintah bertekad menambah jumlah SMK, sehingga mulai tahun ajaran 2014/2015 kuantitas SMK lebih besar dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Mulyatiningsih et al., 2014). Saat ini jumlah SMK aktif terdata mencapai 14.423 di seluruh Indonesia, dengan pembagian SMK Negeri 3,661 dan SMK Swasta 10,762 (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Tingginya jumlah SMK tersebut, berdampak pada persaingan yang cukup selektif bagi sekolah untuk menyalurkan lulusannya. Sehingga, diharapkan juga diikuti dengan kompetensi yang memadai.

Merespon tujuan dan harapan terhadap pendidikan SMK, pemerintah berupaya merevitalisasi SMK agar terjadi peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada level menengah sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Didalam instruksi presiden tersebut memerintahkan kepada para menteri kabinet kerja salah satunya kementerian ketenagakerjaan untuk menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK. Perencanaan tersebut terdiri dari; tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi atau penempatan, dan waktu. Dalam bidang lokasi atau penempatan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memperluas pelayanan penempatan tenaga kerja untuk dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah, salah satunya pendidikan menengah kejuruan yaitu dibentuknya unit pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK sebagai fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.

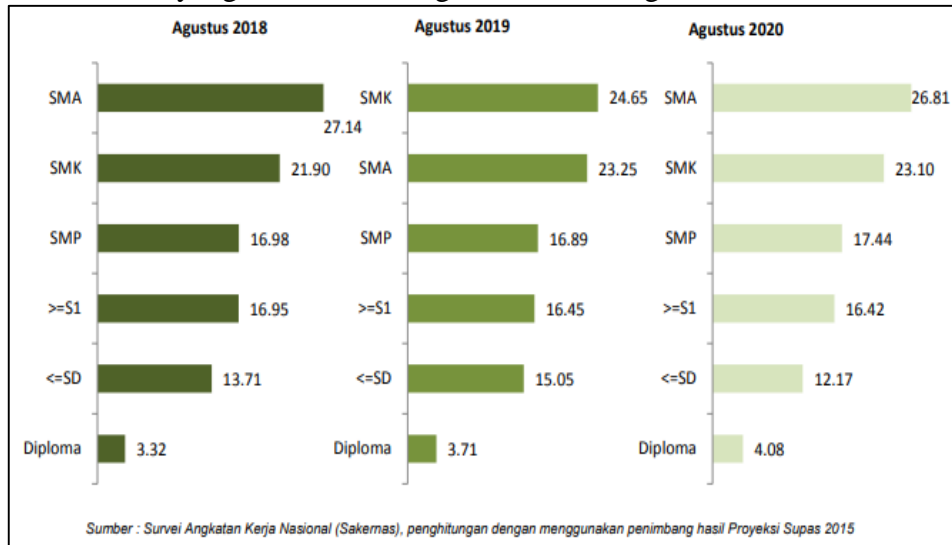
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 33 ayat 1 hingga ayat 2 menegaskan bahwa BKK dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Pembentukan BKK disertai dengan melakukan pendaftaran izin pendirian kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga apabila telah mendapat tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) bagi alumninya. Erfitriana (2016) dalam (Putra et al., 2019) menyatakan bahwa BKK sebagai koneksi antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja, salah satunya BKK SMK yang diperuntukkan kepada siswa SMK dan alumni SMK. BKK SMK berkolaborasi dengan industri guna informasi lowongan pekerjaan lebih mudah didapatkan, serta meningkatkan jangkauan penyaluran lulusan. Melalui BKK SMK, siswa memperoleh informasi lowongan pekerjaan, bimbingan karier atau pengarahan alhasil siswa maupun alumni mempunyai wawasan terkait lapangan pekerjaan yang ada, serta program pelatihan keterampilan yang dipertunjukkan kepada siswa maupun alumni SMK yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (bkk.ditpsmk.net, 2018).

Melihat pengangguran yang terus meningkat di Kabupaten Sidoarjo, terutama pada 2020 dengan status pengangguran tertinggi di Jawa Timur dan didominasi oleh lulusan SMK. Maka BKK pada tiap SMK di Kabupaten Sidoarjo berperan besar dalam menyalurkan alumninya ke Dunia Usaha (DU) maupun Dunia Industri (DI) sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo

yang didominasi lulusan SMK. Adapun BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 73 BKK SMK.

BKK SMK yang dikelola secara optimal akan memberikan dampak positif bagi peserta didik SMK maupun alumni SMK, dalam hal ini alumni SMK di Kabupaten Sidoarjo, serta merepresentasikan kepada masyarakat bahwa sekolah SMK itu baik. Namun pada kenyataannya beberapa BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo belum mempraktikkan tugasnya dengan optimum. Sebagaimana tujuan pembentukan BKK SMK belum tercapai dalam menaikkan angka keterserapan lulusan SMK pada DU/DI. Hal tersebut dapat dilihat pada Berita Resmi Statistik bahwa penduduk bekerja atau terserap di DU/DI menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2018 hingga Agustus 2020 masih diduduki oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 285 ribu orang (26,81 persen), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 246 juta orang (23,10 persen), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 186 ribu orang (17,44 persen), Sarjana sebanyak 175 ribu orang (16,42 persen), Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 129 ribu orang (12,17 persen), dan Diploma sebanyak 43 ribu orang (4,08 persen), Sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.9  
Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Sidoarjo Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018 – Agustus 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik No.1/11/Thn.2020, 16 November 2020

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat di Sidoarjo adalah mereka yang berpendidikan tamat SMA sebesar 3,56 persen poin, diploma sebesar 0,37 persen poin dan SMP sebesar 0,55 persen poin. Sebaliknya, persentase penduduk bekerja berpendidikan tamat SMK mengalami penurunan sebesar 1,55 persen poin dan SD sebesar 2,88 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari Gambar 1.8 dapat diketahui bahwa lulusan SMK yang bekerja pada dunia usaha maupun dunia industri belum masuk kategori ideal. Sebagaimana Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam (Cahyanti et al., 2018) menyatakan bahwa lulusan SMK dikatakan berhasil dalam dunia kerja apabila tenggang waktu lulusan memperoleh pekerjaan setelah lulus maksimal satu tahun dan keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%. Hal tersebut mengartikan bahwa BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan unit pelayanan untuk mempertemukan tamatan SMK dengan pencari kerja maupun

layanan pengarahan dan pelatihan tamatan terkait dunia kerja yang harapannya dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK di Kabupaten Sidoarjo pada DU/DI dinilai belum tercapai tujuan pembentukan BKK sebagaimana keberhasilan BKK dilihat dari tingginya lulusan yang terserap di DU/DI. Hal tersebut juga merupakan visi dan misi dari organisasi BKK untuk menjadi unit pelayanan ketenagakerjaan yang berkualitas serta menjembatani lulusan dengan pemberi kerja sehingga dapat menyiapkan SDM lulusan yang berbekal kemampuan dan *skill* yang berkualitas untuk siap menghadapi dunia kerja, meningkatkan kuantitas lulusan SMK yang terserap ke DU/DI, hingga meningkatkan kuantitas kerjasama dengan DU/DI untuk pemasaran lulusan dalam dunia kerja.

Capaian kinerja BKK dapat diasumsikan belum berjalan dengan efektif atau belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pelayanan penempatan kerja serta bimbingan karir kepada siswa maupun alumni SMK sebagaimana keterserapan lulusan yang masih kurang dari yang ditargetkan. Surjadi (2009:07) dalam (Suwandono & Laksmi, 2019) menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi dapat dinilai dari berhasil tidaknya terhadap tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Hal demikian juga disampaikan Aditama & Widowati (2017) bahwa kinerja organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu adanya pengukuran kinerja sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pada BKK SMK se-Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul

## **“Pengukuran Kinerja Bursa Kerja Khusus SMK Dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan Pada Dunia Kerja Di Kabupaten Sidoarjo”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana Kinerja Bursa Kerja Khusus SMK dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan Pada Dunia Kerja di Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat ketercapaian kinerja Bursa Kerja Khusus SMK dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan Pada Dunia Kerja di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terkait konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya tentang pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Sebagai bahan referensi untuk dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Program Studi Administrasi Publik.

b. Bagi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Sidoarjo

Diharapkan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memetakan problema kinerja BKK SMK se-Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat dikembangkan model penyelenggaraan BKK yang optimum guna menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yang diduduki lulusan SMK melalui terserapnya lulusan ke Dunia Usaha maupun Dunia Industri.

c. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik.

